

## METODE ANALISIS AKAR MASALAH DAN SOLUSI

Ari Harsono P.

Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Indonesisa, Depok 16424, Indonesia

E-mail: ariharsono@yahoo.com

---

### Abstrak

Perbincangan seperti rapat, sidang, diskusi, dan *talk show*, sering kali tidak disertai dengan sebuah metode untuk menganalisis akar masalah dan solusinya maupun tanpa kebutuhan untuk menganalisisnya. Akibatnya perbincangan sangat jarang mendapati akar masalah, dan dengan sendirinya tidak ada penyelesaian mendasar. Metode Analisis Akar Masalah dan Solusi (MAAMS) ini menyajikan suatu cara berpikir yang diperagakan dengan tata-alir (*flow chart*), disertai dengan beberapa contoh. Penerapan MAAMS membantu penggunaanya untuk berpikir induktif maupun deduktif, kualitatif maupun kuantitatif, lebih mendalam dan menyeluruh, serta mempermudah kerjasama inter, multi, atau transdisiplin.

### The Method of Root Cause Analysis and Solutions (MRCAS)

#### Abstract

Most of discourses in meetings, discussions, conferences and talk shows are not equipped with a method which analyzes the root cause and its fundamental solution, and even without the need of analyzing it. As the result, the discourses almost never find the root cause, and so automatically there are be no fundamental solution. The Method of Root Cause Analysis and Solutions (MRCAS) gives a mode of thought figured by a flow chart and some examples. Application of MRCAS helps its users simultaneously thinking inductively and deductively, qualitatively and quantitatively, more deeply and holistically, and also facilitate them in inter or multi or transdiscipline cooperation.

*Keywords: root cause analysis, method, qualitative/quantitative, basic solutions, inter or multi or transdiscipline*

---

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Perbincangan tentang suatu masalah yang berlangsung dalam rapat, sidang, diskusi, maupun *talk show* sering kali berkembang menjadi semakin rumit. Ketika itulah, walaupun amat sangat jarang, dirasakan pentingnya mengetahui apa yang menjadi akar atau duduk perkara dari masalah. Sayangnya ketika ada seseorang yang menyatakan sesuatu sebagai akar masalah, peserta lain pun mengemukakan sesuatu yang lain sebagai akar masalah. Masing-masing mengklaim pernyataannya sebagai akar masalah, tetapi tidak disertai penjelasan yang gamblang, eksplisit, sistematis, dan mudah diperagakan; dengan kata lain tidak metodis.

Akibatnya, perbincangan lisan maupun tertulis menjadi bertele-tele dan tidak berakhir dengan solusi (yang mendasar); menghamburkan pikiran, waktu/ ruang, dan biaya; serta tetap membingungkan hadirin maupun

banyak orang yang awam. Secara keseluruhan perbincangan tersebut tidak mencerdaskan, tidak meningkatkan kualitas berpikir, dan tidak membantu masyarakat mengatasi masalah. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu metode – sekurang-kurangnya sesuatu yang lebih metodis dan dapat diperagakan– untuk membantu proses berpikir dan proses perbincangan agar produktif.

Metode ini semula dirancang untuk keperluan pengajaran di kelas sejak 1995. Setelah dikembangkan dengan beberapa perbaikan, makalah disampaikan dalam sebuah seminar Asosiasi Peneliti dan Pengembang Pendidikan Tinggi pada 16 Oktober 1999 di Jakarta.

Tulisan ini menyajikan suatu metode berpikir dengan menggunakan tata alir (*flow chart*) yang terutama dimaksudkan untuk mendapatkan “sebab terdalam atau akar suatu masalah”, dan kemudian, berdasarkan itu, dapat membuat alternatif solusi dasar. Metode ini

dilengkapi dengan beberapa konsep dan syarat yang perlu digunakan dalam menerapkannya". Konsep yang terpenting adalah pendekatan terhadap masalah (realitas); sumber-sumber kebenaran (hati nurani, ilmu, filsafat, agama, ditambah seni sebagai fasilitator); dan teori-teori kebenaran (*theory of truth*), yang secara keseluruhan mengarahkan kecerdasan akal dan kejujuran dalam proses berpikir.

Munculnya kebutuhan menyusun MAAMS ini didorong oleh dua inspirasi, faktual dan konseptual. Yang faktual, yakni banyak orang yang menyatakan sesuatu sebagai akar masalah (sosial-politik dan kebijakan publik, terutama) tetapi mereka tidak memberikan metode atau caranya. Barangkali hal ini memang disebabkan oleh belum lazimnya penggunaan metode untuk itu. Sepanjang pengalaman kuliah, belum ada dosen yang menggunakan metode penelusuran atau analisis akar masalah untuk masalah-masalah sosial-politik dan kebijakan publik. Pencarian kepustakaan sejenis di perpustakaan maya dengan menggunakan piranti *Google* pada awal Juli 2007 menemukan istilah *root cause analysis* (RCA), *why-because analysis* (WBA), *fishbone diagram* dan *why-why analysis* di sebuah buku (Cooke, 1991:254, Chang, 2003: 29, Gaspers, 2007:59-72), yang kebanyakan diterapkan dalam bidang kedokteran, keteknikan, dan manajemen.

Penggunaan metode analisis akar masalah dengan model visual dalam masalah-masalah sosial politik dan kebijakan publik, dalam kepustakaan berbahasa Indonesia, tampaknya bahkan belum ada. Penulis baru menemukan satu contoh yang mirip dengan penggunaan metode ini tetapi tanpa disertai model visual dan urutan tata caranya, yakni pada tulisan Kwik Kian Gie berjudul "KKN Akar Semua Permasalahan Bangsa" (*Kompas*, 2004). Kelangkaan ini merupakan sesuatu yang layak dikaji tersendiri, khususnya untuk tujuan pengembangan ilmu sosial (dan humaniora) yang di Indonesia sedang dalam keadaan krisis berkepanjangan (Heryanto, 1999) tanpa perhatian yang memadai, di tingkat fakultas, universitas, maupun konsorsium nasional.

Inspirasi faktual lainnya bersifat praktis, meski tidak sepenuhnya, yakni untuk memfasilitasi mahasiswa di kelas Ilmu Sosial Dasar (ISD) dan kemudian menyusul kelas Etika dan Filsafat Komunikasi, dengan menyajikan pengajaran yang lebih meyakinkan. ISD yang sejak awal penulis artikan sebagai Ilmu tentang Masalah Sosial dan Solusi yang Dasar, memaksa penulis sendiri untuk dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang "dasar" dari ISD maupun masalah sosial-kemanusiaan, agar jelas pula solusi dasarnya. "Dasar" dalam ISD tidak tepat bila diartikan sebagai awal atau pengantar –seperti yang diasumsikan oleh para pengajar ISD lainnya maupun panduan kurikulum/silabusnya– sebab tidak ada mata kuliah lanjutannya dan memang tidak cukup perlu bagi mahasiswa non-sosial. Jadi,

"dasar" harus diartikan kurang lebih sebagai mendasar, yang paling dasar/dalam, yang inti, atau akar.

Inspirasi yang konseptual berasal dari analisis Aristoteles tentang kekhususan filsafat yakni "mencari sebab-sebab yang terdalam dari seluruh realitas" (Bagus, 1991). Pernyataan ini tidak cukup mudah untuk dicerna – juga bagi penulis sendiri – apalagi untuk diterapkan dalam pengajaran bagi orang lain. Penulis, mulanya, hanya sekedar bertanya "apa sebab-sebab terdalam dari keseluruhan masalah sosial?" tanpa mampu menjawab secara memuaskan atau meyakinkan diri sendiri. Karena itu cara mencari tersebut perlu dijabarkan ke tingkat yang lebih kongkret.

Inspirasi konseptual lainnya adalah pengetahuan bahwa kegiatan berpikir pada umumnya, atau hampir selalu, mengandaikan adanya suatu metode tertentu. Apalagi bila kegiatan berpikir itu lebih mendalam sifatnya karena menyangkut akar. Hal ini bisa dibandingkan dengan kegiatan berpikir filsafati – yang lebih mendalam dibanding berpikir biasa – yang ditandai dengan metode tertentu yang digunakan oleh masing-masing filsufnya (Rapar, 1996; Bakker, 1986). Dengan menggunakan metode dalam kegiatan berpikir, jalan menuju pemahaman obyek yang dipermasalahkan menjadi teratur dan sistematis. Dengan metode tersedia 'jalan yang melaluinya' – *meta hodos, methodos* – orang lain dapat tiba pada akhir yang (kurang lebih) sama, sekurang-kurangnya dapat diperbandingkan atau diuji dengan ukuran yang sama.

## 1.2. Beberapa Konsep Pendukung

Sebelum analisis dilakukan perlu diperhatikan lebih dulu tiga komponen konseptual yang melengkapi MAAMS.

Pertama, mengenai instansi atau sumber kebenaran, yang tidak hanya satu seperti hakikatnya penampakan realitas yang beragam. Ia mencakup hati nurani, ilmu, filsafat, dan agama (ditambah seni sebagai fasilitatornya); semuanya digunakan secara menyeluruh dan saling melengkapi. Sedangkan teori kebenaran antara lain: teori korespondensi, teori konsistensi/koherensi, teori pragmatis (Muhadjir, 2001), dan teori konsensus dari Habermas (Budi Hardiman, 1990).

Kedua, mengenai pendekatan terhadap masalah (dan solusi) yang dibedakan menjadi dua. Ada masalah sosial dan kemanusiaan yang khas individual – ungkapan populernya: "tergantung pada individu masing-masing – ada pula masalah yang khas sistemik. Masalah sosial dan kemanusiaan sebagian besar membutuhkan kedua-duanya. Pendekatan individual/personal/mentalistik beranggapan bahwa letak sebab dari masalah adalah di dalam diri manusia pelaku (aktor/agen), kualitas perorangan seperti niat, iman, disiplin-diri, nilai-budaya, kadar moralitas, kognisi, dan sebagainya yang proses

internalisasinya tak dapat dikenai sanksi hukum (lebih bersifat imbauan). Pendekatan sistemik/struktural/institusional/legalistik beranggapan bahwa letak sebab dari masalah adalah di luar diri manusia berupa kesempatan, kualitas sistem, kualitas hukum, undang-undang, peraturan yang mempunyai sifat memaksa. Kedua pendekatan ini –karena dipandang sebagai dualitas (Herry-Priyono, 2002: 22-36) – juga digunakan sekaligus dengan proporsi tertentu sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Ketiga, berkaitan dengan kecerdasan (IQ) dan kejujuran (EQ dan SQ) dalam berpikir, khususnya dalam mengidentifikasi sebab-sebab. Di samping kecerdasan yang memadai, yang lebih diutamakan adalah kejujuran yang merupakan keutamaan moral dasar (Magnis-Suseno, 1989). Kejujuran sangat dituntut, khususnya ketika menemukan sebab negatif yang ternyata berkait dengan diri sendiri. Pada titik ini sering orang menghindari untuk tidak mengidentifikasinya, dan sebagai gantinya menyebut sebab lain yang juga masuk akal, bahkan tampak sangat masuk akal, tapi tidak berkait dengan dirinya. Jika ini yang terjadi akar masalah/penyebab tidak ditemukan, atau walaupun dianggap sebagai akar masalah, jadinya semu bahkan menyesatkan secara sengaja (manipulasi). Dari kesembilan unsur kejujuran, yang terpenting adalah pengakuan yang tulus bahwa diriku atau pendapatku lebih keliru dibanding orang lain (Harsono P., 2002). Jika ketulusan tidak muncul perlu pengkondisian agar pengakuan akhirnya muncul, seperti yang dilakukan di pengadilan (dengan sumpah dan *lie detector*).

## 2. Metode dengan Peragaan Tata-Alir (*flow chart*)

Pada awalnya penulis menjabarkan cara berpikir untuk mengidentifikasi akar masalah/penyebab dalam wujud model verbal. Model verbal yang pertama hanya berupa rangkaian “mengapa–sebab(-sebab)–mengapa, dan seterusnya” yang ditujukan pada kasus atau masalah sosial tertentu. Setelah diujicoba dalam kuliah, dibuat model verbal berikutnya berupa “mengapa–sebab (sebab)–benarkah (ya/tidak)–mengapa, dan seterusnya”. Kemudian, agar lebih mudah lagi, kongkrit, dan dapat ditirukan mahasiswa, dibuat peraga/model visualnya berupa tata-alir (*flow chart*).

Ketika mencermati pernyataan Aristoteles tersebut di atas, penulis ingat akan sebuah pernyataan atau anjuran sederhana yang penulis lupa sumbernya. “Kalau mau berpikir mendalam, ajukanlah pertanyaan “mengapa” secara berulang-ulang”. Lalu secara apa adanya, terhadap berbagai masalah sosial yang ramai diperbincangkan penulis ajukan pertanyaan “mengapa/mengapa terjadi” secara berulang-ulang mengiringi setiap jawaban yang penulis kemukakan sendiri. Praktik latihan ini tidak memberi hasil yang memuaskan bagi

penulis. Anjuran atau saran tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan begitu saja atau sesederhana itu. Jawaban yang muncul demikian banyak kemungkinannya dan “tanpa akhir”. Karena itu model diperbaiki lagi dengan membuat beberapa pembatasan atau syarat.

Berikut ini adalah langkah-langkah menjalankan MAAMS:

- a. Rumuskan suatu masalah (sosial dan kemanusiaan) dalam bentuk yang dapat diajukan pertanyaan “apa sebab-sebabnya.” Misalnya, apa penyebab timbulnya perkelahian pelajar; mengapa kualitas SDM kita rendah, mengapa Malaysia berani mengincar Ambalat, apa sebab penularan HIV/AIDS, juga pemakaian narkoba yang semakin meluas? Jenis pertanyaan yang mengarah pada solusi ini harus didukung fakta. Jika dari judul (artikel, makalah, skripsi, tesis, disertasi) tidak dapat diajukan pertanyaan (“Apa Sebabnya” atau “Mengapa”), identifikasi lebih dulu alasan-alasan atau fakta-fakta yang biasanya ditulis sebagai latar belakang masalah. Terhadap alasan-alasan atau fakta-fakta inilah diajukan pertanyaan mengapa atau apa sebab-sebabnya.
- b. Identifikasi sebab-sebab negatif yang paling langsung dari X. Misalnya ada 4 faktor, ditandai dengan Sa1, Sb1, Sc1, Sd1. (S=sebab; abcd=masing-masing faktor; angka 1=tahap pertama penelusuran sebab). Sebab negatif yaitu suatu keadaan salah-buruk yang perlu diatasi atau diperbaiki; sedangkan paling langsung yaitu sebab yang tidak diantarai oleh sebab lain. Dalam fenomena sosial hampir tidak ditemukan adanya satu faktor yang menyebabkan satu fakta lain, melainkan beberapa faktor sekaligus, baik secara kausal maupun korelasional. Di sinilah muncul kebutuhan untuk berpikir dan berkerjasama secara interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin.
- c. Terhadap masing-masing sebab (faktor) diajukan pertanyaan “benarkah?” dalam arti apakah ia memang menjadi sebab dari masalah X. Untuk itu lebih dulu dilakukan pengkajian atau penelitian, baik secara logis (formal) ataupun empiris (material), kualitatif maupun kuantitatif, induktif maupun deduktif (Hayon, 2005). Jika hasilnya benar, tahap kedua dari penelusuran sebab dapat dilakukan, yang berarti mencari sebab-sebab dari setiap sebab pada tahap pertama (Sa1, Sb1 dan seterusnya). Jika hasilnya salah, sebab tersebut diabaikan dan kembali ke awal dengan mengidentifikasi kemungkinan sebab lainnya. Pada langkah ketiga inilah keseluruhan pengetahuan tentang kebenaran dan pendekatan terhadap masalah diterapkan secara kritis.
- d. Tahap kedua dan seterusnya (tahap ke *n*) caranya sama seperti tahap pertama. Bedanya adalah bahwa kemungkinan sebab (faktor) yang diidentifikasi menjadi semakin sedikit karena adanya kesamaan sehingga bukan a,b,c,d lagi tapi a,b,c, dan pada akhirnya a dan b sebagai sebab terdalam atau akar masalah (a dan b menunjukkan bahwa sebab dasar terdiri lebih dari satu sebab).

**Catatan:**

*Pertama*, sangat mungkin bahwa penyebab Sa1 (atau Sb1) lebih dari satu sehingga bukan hanya Sa2 tapi Sa2.1 dan Sa2.2; identifikasi lebih dari satu sebab ini penting dilakukan sebelum menetapkan salah satu atau semuanya untuk ditelusuri. Dalam hal ini untuk penelusuran tahap ketiga (Sa3) bisa saja dipilih satu yang paling relevan atau yang menunjukkan kesamaan dengan Sb3, Sc3, atau Sd3.

*Kedua*, sebab-sebab yang sudah ditulis dengan sendirinya tidak dapat ditulis lagi pada tahap berikutnya; hal ini untuk menghindari alur pikir melingkar atau lingkaran setan.

*Ketiga*, rumusan kalimat secara keseluruhan harus bermakna hal negatif, bukan positif, kecuali pada jenis masalah yang sifatnya “hanya demi peningkatan untuk lebih baik lagi, bukan pemulihan”.

*Keempat*, rumusan kalimat untuk setiap sebab tidak menggunakan kata-kata seperti karena, sehingga, maka, akibatnya, dsb.

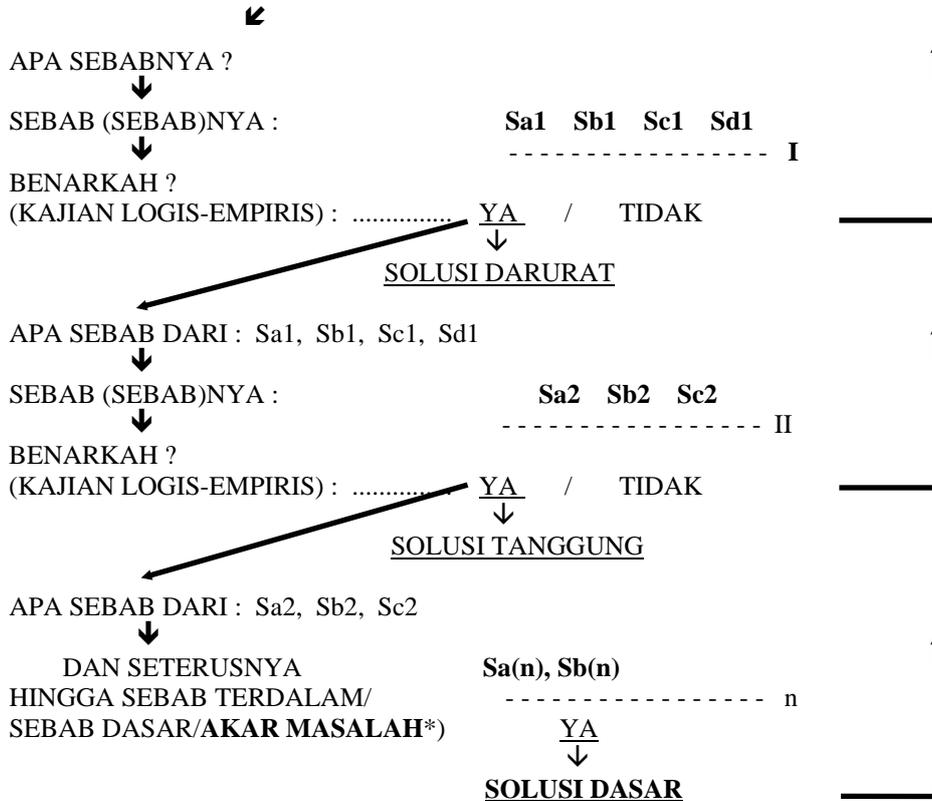
*Kelima*, sebab yang ditulis pada urutan berikutnya bukan sekedar penjabaran atau ungkapan lain dari

sebab sebelumnya. Penjabaran atau rincian yang panjang dapat disampaikan dalam bentuk catatan kaki.

- e. Penelusuran dapat dihentikan dengan memperhatikan dua syarat. Pertama, apa yang dipandang sebagai akar masalah tersebut dapat secara sekaligus dicarikan solusi individual/personal/mentalistik –berupa imbauan pada nurani atau niat seseorang– maupun solusi sistemik/struktural/institusional/legalistik –berupa UU atau peraturan dengan sanksi hukum. Solusi individual relatif mudah dilaksanakan, sedangkan solusi sistemik lebih sulit dilaksanakan. Oleh karena itu untuk memenuhi syarat solusi sistemik ini, rumusan sebab atau akar masalah hendaknya memperlihatkan perilaku nyata yang cukup mudah diamati, dan tentu saja layak untuk dijatuhi sanksi hukum. Jika syarat ini tidak terpenuhi, proses diulang dari tahap sebelumnya atau dari awal lagi. Kedua, terdapat persetujuan dari peserta yang terlibat perbincangan.

**Catatan:** Cukup sering terjadi, penelusuran sebab berhenti sebelum sampai pada akar masalah/akar penyebab. Mungkin ini terjadi karena keengganan, kemalasan, kurang mampu, atau kurang jujur.

**TATA ALIR METODE AAMS  
MASALAH SOSIAL (“X”)**



\* Akar Masalah (**San, Sbn**) harus bisa disepakati, dan bisa langsung dicari solusi individual & sistemiknya sekaligus

\*\* Sebab yang ditelusuri adalah sebab yang negatif

f. Mengenai solusi, di dalam *flow chart* dibedakan menjadi tiga: darurat/permukaan/jangka pendek, tanggung/jangka menengah, dan dasar/jangka panjang. Jika identifikasi sebab-sebab dilakukan hanya sampai permukaan saja, maka solusinya pun bersifat permukaan, demikian pula bila tanggung (Dua tahap inilah yang sering terjadi sehingga menimbulkan perbincangan yang berkepanjangan, dan lalu dipotong-potong menjadi kemasan topik-topik kecil yang sangat banyak jumlahnya. Analisis yang tidak tuntas ini, secara sadar atau tidak, dimanfaatkan oleh media massa secara komersial – komodifikasi masalah– berupa *talk show* dan rubrik opini. Kalangan akademis pun bisa tanpa sadar melakukan hal yang sama dengan mengemasnya sebagai topik-topik penelitian dan diskusi, dan tema jurnal yang mungkin “sekadar” menambah penghasilan, publikasi, dan angka kredit kenaikan pangkat. tetapi tidak mengatasi masalah secara “tuntas”. Kerjasama media massa dan ilmuwan bisa

tergelincir melakukan “*play acting at science*” yang memunculkan ilmuwan selebritis). Hanya bila akar masalah teridentifikasi maka solusi yang mendasar dapat dirumuskan. Selanjutnya, solusi dasar ditindaklanjuti lagi dengan evaluasi, termasuk dengan penelusuran ulang sebab-sebab.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa MAAMS merupakan metode yang memiliki sifat kualitatif, deduktif maupun induktif, yang dalam penerapan rincinya (tahap pembuktian/penelitian) sangat mungkin membutuhkan analisis data kuantitatif serta penerapan logika formal dan logika material.

Berikut ini adalah contoh-contoh penerapan metode MAAMS yang, mengingat keterbatasan penulisan, tidak sepenuhnya menerapkan langkah ke-3, khususnya penelitian empiris. Meski demikian keseluruhan contoh diharapkan sudah dapat menjelaskan penerapan MAAMS.

**Tabel 1.**  
**Contoh 1: Mengapa Kualitas SDM Kita Rendah?**

<b>Sebab a1</b>	<b>Sebab b1</b>	<b>Sebab c1</b>	<b>Sebab d1</b>
Kualitas guru (dosen) rendah (menjadi rendah) setelah masuk di dalam sistem birokrasi.	Kualitas murid (lulusan) sebagai input banyak yang rendah	Kurikulum pendidikan kurang tepat, salah arah (dalam konsep dan operasionalisasinya)	Kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap peningkatan kualitas SDM tidak memadai
<b>Sebab a2</b>	<b>Sebab b2</b>	<b>Sebab c2</b>	<b>Sebab d2</b>
Sibuk mengajar, mengejar jabatan struktural, sangat minim temuan akademis (konsep, model, teori, paradigma) baru.	Kualitas unit yang memroses juga rendah (guru, fasilitas, kualitas)	Adanya kepentingan yang tidak etis dalam merumuskan konsep maupun pelaksanaannya	Masyarakat sendiri (sebagian) sudah terpolusi/ terkontaminasi praktik yang tidak etis/curang (kolusi, suap, dsb)
<b>Sebab a3</b>	<b>Sebab b3</b>	<b>Sebab c3</b>	<b>Sebab d3</b>
Kesejahteraannya rendah, tidak mencukupi kebutuhan.	Anggaran pendidikan dalam APBN rendah	Masyarakat tidak memiliki akses kontrol yang memadai	Kurang beningnya proses seleksi dan evaluasi siswa maupun karyawan.
<b>Sebab a4</b>	<b>Sebab b4</b>	<b>Sebab c4</b>	<b>Sebab d4</b>
Anggaran gaji PNS kecil (APBN terbatas)	Pajak yang terkumpul hanya dari sekitar 50% wajib pajak (temuan Hussein Kartasasmita, rubrik pajak, 1994). Sebagian sisanya digelapkan.	Sistem demokrasi yang digunakan, sadar atau tidak, dirancang oligarkhis.	Ada semacam kesengajaan pada pembuat keputusan, agar terdapat celah untuk “memainkan” kekuasaan demi keuntungan pribadi/keompok.
<b>Sebab a5</b>	<b>Sebab b5</b>	<b>Sebab c5</b>	<b>Sebab d5</b>
Pajak yang terkumpul hanya dari sekitar 50% wajib pajak (temuan Hussein Kartasasmita, analisis pajak, 1994). Sebagian sisanya digelapkan.	1. Korupsi Harta melalui Tahta 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) tahta.	1. Korupsi Tahta 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) harta dan tahta.	1. Korupsi Tahta demi Harta atau Tahta lainnya. 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) harta + tahta.
<b>Sebab a6</b>			
1. Korupsi Harta melalui Tahta 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang yang benar & baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) tahta.			

**Tabel 2.**  
**Contoh 2: Mengapa Terjadi Tawuran Antar-Pelajar**

<b>Sebab a1</b>	<b>Sebab b1</b>	<b>Sebab c1</b>	<b>Sebab d1</b>
Perhatian orang tua (komunikasi) rendah.	Kadar moral/agama pelajar rendah.	Lingkungan sekolah rawan.	“Pembudayaan” kekerasan di media massa.
<b>Sebab a2</b>	<b>Sebab b2</b>	<b>Sebab c2</b>	<b>Sebab d2</b>
Orang tua terlalu sibuk (untuk mencukupi kebutuhan, dsb)	Pendidikan/pengajaran moral/agama kurang memadai, tidak sesuai dengan praktik.	Berdekatan dengan pusat keramaian: mall, dsb. (Semula jauh)	Komersialisasi dan komodifikasi informasi kejahatan dan hiburan yang mengandung kekerasan.
<b>Sebab a3</b>	<b>Sebab b3</b>	<b>Sebab c3</b>	<b>Sebab d3</b>
Gaji orang tua (terutama PNS) kurang memadai	Guru tidak bisa diteladani (terima suap, “jual nilai”)	Aparatnya kolusi dengan pengusaha. Tata ruang diubah semauanya.	Lemahnya (mekanisme) kontrol terhadap isi siaran media massa.
<b>Sebab a4</b>	<b>Sebab b4</b>	<b>Sebab c4</b>	<b>Sebab d4</b>
Anggaran gaji PNS kecil (APBN minim)	Kesejahteraannya rendah, anggaran untuk gaji guru PNS kecil (APBN minim).	1. Gaji aparat rendah. 2. Kontrol dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan sangat terbatas	Kontrol dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan sangat terbatas
<b>Sebab a5</b>	<b>Sebab b5</b>	<b>Sebab c5</b>	<b>Sebab d5</b>
Pajak yang terkumpul hanya dari sekitar 50% wajib pajak (temuan Hussein Kartasasmita, rubrik pajak, 1994). Sebagian sisanya digelapkan.	Pajak yang terkumpul hanya dari sekitar 50% wajib pajak (temuan Hussein Kartasasmita, rubrik pajak, 1994). Sebagian sisanya digelapkan.	1. Pajak yang terkumpul hanya dari sekitar 50% wajib pajak (temuan Hussein Kartasasmita, rubrik pajak, 1994). Sebagian sisanya digelapkan. 2. Sistem demokrasinya, sadar atau tidak, dirancang oligarkhis.	Ada semacam kesengajaan pada pembuat keputusan, agar terdapat celah untuk “main-main” kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok.
<b>Sebab a6</b>	<b>Sebab b6</b>	<b>Sebab c6</b>	<b>Sebab d6</b>
1. Korupsi Harta melalui Tahta 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) tahta.	1. Korupsi Harta melalui Tahta 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) tahta.	1. Korupsi Harta dan Tahta 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang yang benar & baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) harta + tahta.	1. Korupsi Tahta demi Harta atau Tahta lainnya. 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) harta + tahta.

**Tabel 3.**  
**Contoh 3: Mengapa kepemimpinan Bush Jr. membuat keputusan menyerang Irak?**

<b>Sebab a1</b>	<b>Sebab b1</b>	<b>Sebab c1</b>
Ada kepentingan tersembunyi yakni bisnis minyak keluarga Bush dan kawan-kawan ( <i>Kompas</i> , 2004).	Untuk menjamin pasokan minyak AS yang boros energi (dibanding bangsa lain).	Memenuhi amanat (dendam) Bush Sr. kepada Saddam.
<b>Sebab a2</b>	<b>Sebab b2</b>	<b>Sebab c2</b>
Memperoleh laba/menambah kekayaan pribadi melalui kesempatan yang bukan pribadi. (Penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri).	Menaikkan pamornya sebagai presiden yang mampu memenuhi kebutuhan rakyat sehingga dapat dipilih lagi meski dengan cara yang salah.	Untuk membahagiakan/memuaskan keinginan orang tua melalui upaya negara.
<b>Sebab a3</b>	<b>Sebab b3</b>	<b>Sebab c3</b>
1. Korupsi tahta demi harta. 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu ( <u>Bush</u> ) berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) harta & tahta	1. Korupsi tahta. 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu ( <u>Bush</u> ) berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) tahta.	1. Korupsi tahta demi orang tua. 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu ( <u>Bush</u> ) berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) tahta.

**Tabel 4.**  
**Contoh 4: Mengapa kepemimpinan para pebisnis “membuat keputusan” menyuap**

<b>Sebab a1</b>	<b>Sebab a1</b>	<b>Sebab c1</b>
Ingin cepat menyelesaikan urusan melalui jalan pintas tanpa peduli mengorbankan orang lain atau tidak	Aparat (negara) sengaja mempersulit pelayanan	Ingin produknya dibeli (dengan lebih dulu memberi imbalan material maupun non-material (harta, tahta, “cinta” kilat)
<b>Sebab a2</b>	<b>Sebab b2</b>	<b>Sebab c2</b>
Egoisme yang berlebihan (Sikap sosial yang rendah)	Aparat ingin minta bagian secara tidak langsung atas keuntungan pihak yang “dilayaninya”	Mengejar target penjualan (laba) secara gampang
<b>Sebab a3</b>	<b>Sebab b3</b>	<b>Sebab c3</b>
Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu (pengusaha) berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) harta dan tahta.	Gaji aparat sangat kecil dibanding penghasilan orang yang dilayaninya (kecemburuan sosial)	Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu (pengusaha) berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) harta dan tahta.
<b>Sebab b4</b>		
Distribusi kekayaan nasional tidak adil, salah dan buruk.		
<b>Sebab b5</b>		
1. Korupsi harta 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh -mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu ( <i>aparat pemerintah</i> ) maupun sistem ( <i>pemerintah</i> ) berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) harta dan tahta.		

**Contoh 5: Aborsi (Perselingkuhan/Zinah, Keretakan Rumah Tangga, Pelacuran, Penularan HIV/AIDS, Wanita/Pria Simpanan atau Panggilan).**

Untuk masalah-masalah dalam Contoh 5, penelusuran dengan tata alir sebenarnya tidak harus dilakukan, sebab masalahnya tidak serumit masalah yang disebut terdahulu. Kalaupun MAAMS akan digunakan, prosesnya juga lebih sederhana.

Misalnya, gadis A menggugurkan kandungan. Mengapa? Sebab ia merasa malu atas kehamilannya. Mengapa malu? Ia hamil sebelum menikah. Mengapa hamil sebelum menikah? Sebab gadis A dengan pria B – yang bukan muhrim – “berada di ruangan terkunci, tertutup rapat atau tempat yang sunyi”.

Pertanyaan “mengapa” bisa saja dilanjutkan dan tetap ada jawaban. Tetapi jawabannya berupa sebab positif – jadi bukan merupakan masalah – atau sebab negatif yang tidak memperlihatkan perilaku nyata yang sulit dijangkau hukum – jadi bukan akar masalah. Misalnya, mengapa “berada di ruangan terkunci, tertutup atau tempat yang sunyi”? Sebab ingin secara langsung menyampaikan isi hati (curhat). Curhat boleh-boleh saja (positif), tetapi haruskah dengan “berada di ruangan terkunci, tertutup atau tempat yang sunyi”. Jawabannya, tidak. Jika jawaban berupa sebab negatif, misalnya: imannya lemah, bukan perilaku nyata yang mudah dijangkau sanksi hukum.

Aborsi bisa saja dilakukan oleh pasangan yang sah, tetapi oleh sebab yang dapat dipertanggung-jawabkan sehingga perlu dilakukan aborsi (misalnya kehamilan tertentu yang membahayakan nyawa ibu) atau korban perkosaan. Yang paling banyak terjadi adalah aborsi yang dilakukan oleh pasangan yang tidak sah dengan “berada di ruangan terkunci, tertutup atau tempat yang sunyi”.

Perselingkuhan/zinah juga terjadi karena sebab dasar yang sama. Seorang suami (atau isteri) bisa saja tidak bahagia dalam perkawinannya, krisis saling percaya, rendah komitmen dan komunikasinya. Akan tetapi jika dia tidak “berada di ruangan terkunci, tertutup atau tempat yang sunyi” dengan lawan jenis lainnya yang dikencaninya, zinah tidak terjadi. Tetapi dewasa ini, banyak juga terjadi pasangan yang tampak “baik-baik” (jadi bukan baik sungguh), ternyata juga melakukan tindakan “berada di ruangan terkunci, tertutup atau tempat yang sunyi” dengan selain pasangan sahnya. Apabila “Korupsi Cinta” ini diketahui oleh pasangan atau anggota keluarganya tak jarang muncul masalah keretakan rumah tangga dengan akibat-akibat negatif ikutannya yang lebih berat seperti perceraian. Faktor “berada di ruangan terkunci, tertutup atau tempat yang sunyi” entah mengapa jarang disebut-sebut oleh pembicara atau yang dianggap pakar dalam *talk show*, seminar, maupun karya ilmiah.

Penularan HIV/AIDS banyak disebabkan oleh faktor “berada di ruangan terkunci/tertutup atau tempat yang sunyi”, selain penggunaan bergantian jarum suntik bernarkoba. Faktor penyuluhan dan penggunaan kondom, di banyak negara berkembang, terbukti tidak efektif meski telah menghasilkan penghargaan-penghargaan bagi aktivis relawan dan wartawan yang mencurahkan perhatiannya.

Jadi, akar dari masalah-masalah tersebut adalah “adanya (terutama dua orang) laki-laki dan perempuan bukan muhrim berkencan/berada di ruangan yang terkunci, tertutup rapat atau tempat yang sunyi” seperti kamar hotel, motel, kost yang tidak dipantau, lokalisasi prostitusi, apartemen atau rumah biasa yang sepi penghuni atau dihuni oleh wanita/pria simpanan. Hal ini sesungguhnya juga menjadi akar masalah dari pornografi (yakni saat pembuatannya), wanita/pria simpanan, prostitusi terselubung, pesta “*one night stand*”, *sex after lunch*, bahkan juga pelacuran anak-anak.

Akar penyebab kedua adalah ‘pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang yang benar dan yang baik pada diri individu maupun sistem dalam memenuhi kebutuhan dasar (motivasi) terutama libido (“cinta”). Kalau seseorang memiliki ‘pengetahuan yang memadai’ tentang salah-buruknya berada di ruangan terkunci-tertutup-sepi dengan lawan jenis yang bukan muhrim, ia tidak akan melakukannya.

Sudah tentu ada kekecualian yang sungguh langka untuk masalah-masalah dalam Contoh 5 tersebut. Hanya orang tertentu saja (tidak banyak jumlahnya) dan hanya dalam waktu tertentu saja –lama dan frekuensinya– yang dapat mengatasi godaan yang ditimbulkan keadaan ini. Kalau orang-orangnya (pasangan yang sama), beberapa kali mengalami keadaan ini, godaan untuk berhubungan seperti suami isteri akan sulit untuk dielakkan.

Terhadap masalah-masalah di atas lazimnya diajukan solusi dengan pendekatan individual: memperkuat iman melalui agama seperti pesantren kilat, retreat, konsultasi dengan psikolog, atau ceramah seksolog. Solusi-solusi ini hanya mengatasi gejala, bukan akar masalahnya, sehingga akan banyak bermunculan lagi dan dijadikan “komoditas tetap” oleh beberapa pihak, terutama media massa, berupa perbincangan atau penceritaan dalam buku, sinetron, dan film. Sudah saatnya, pendekatan solusi individual dilengkapi dengan pendekatan solusi sistemik/ struktural/ institusional/ legalistik dengan membuat dan memperkuat hukum berupa undang-undang serta rincian peraturan pelaksanaannya.

Dari kelima contoh penerapan MAAMS di atas dapat dinyatakan bahwa akar masalah dari berbagai masalah sosial kemanusiaan tersebut adalah: *pertama*, “korupsi

3Ta (harta, tahta, cinta/hubungan pria-wanita)”, dan ini berimpit dengan yang *kedua*, “pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang ‘yang benar’ dan ‘yang baik’, pada individu maupun sistem, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) 3Ta”. Korupsi 3Ta berarti tindakan memenuhi motivasi atau kebutuhan dasar 3Ta secara tidak halal, tidak bermoral/etis, tidak legal, tidak benar-baik-bersih –secara singkat dan padat: tidak “jujur”.

Korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” yang memiliki arti: hal merusak, membuat busuk, pembusukan, kemerosotan. *Corruptor* berarti perusak, pembusuk, penggoda, pemerdaya; dan *corruptrix*: wanita pemerdaya (Prent, 1969). *Harta*: segala sesuatu yang secara moral dan legal dapat diuangkan. *Tahta*: segala sesuatu yang menimbulkan/ mengandung kekuasaan, kedaulatan, pengaruh, penghargaan, hormat, kekaguman, ketundukan, kepatuhan; wujud utamanya adalah jabatan, kewenangan, status/kedudukan sosial. *Cinta/hubungan pria wanita* (yang paling potensial bermasalah) adalah: kondisi dengan tingkat tertentu yang menyebabkan/memudahkan terjadinya hubungan pria-wanita laksana suami-isteri (kondisi dimaksud adalah seperti ruangan terkunci, tertutup rapat, atau tempat yang “sepi”).

Korupsi harta adalah hal yang membuat keutuhan harta (yang sudah atau bahkan akan dimiliki) menjadi merosot, berkurang nilainya (Contoh analisis cukup jelas).

Korupsi tahta adalah hal yang membuat keutuhan tahta (yang sudah atau akan dimiliki) menjadi merosot, membusuk, rusak kualitasnya atau rusak pengaruhnya (Contoh analisis cukup jelas). Korupsi tahta yang paling strategis berupa kesalahpimpinan.

Korupsi cinta/hubungan pria-wanita: hal yang membuat keutuhan cinta (yang sudah atau akan dimiliki) menjadi merosot, membusuk atau rusak karena mengutamakan nafsu birahi dan kenikmatan fisik sambil mengabaikan kesucian, rasa hormat, tanggung jawab, perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemekaran diri yang berjangka waktu ‘hari ini dan seterusnya’. Korupsi cinta sangat mudah terjadi bila pria dan wanita bukan mahram, terutama berdua, berada di ruangan terkunci, tertutup rapat, atau tempat sepi.

Adanya seseorang – sebagai individu ataupun sebagai pejabat publik – yang melakukan korupsi atas salah satu dari 3Ta berarti pada saat yang sama menunjukkan “tidak memadainya pengetahuan yang utuh-menyeluruh-mewujud tentang ‘yang benar’ dan ‘yang baik’ pada individu tersebut maupun sistemnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) 3Ta.” Tidak memadainya ‘pengetahuan’ itu mungkin disebabkan oleh: orang, sistem, atau kedua-

duanya belum memilikinya, atau pengetahuan yang ada sudah usang atau tidak sesuai lagi.

Korupsi 3Ta, sangat mungkin saling berhubungan, bahkan korupsi harta hampir selalu dipermudah oleh korupsi tahta (penyalahgunaan wewenang, kolusi dan nepotisme). Korupsi tahta sekaligus cinta antara lain menimbulkan relasi jender yang tidak adil, poligami yang bukan darurat, serta pelecehan seksual. Korupsi cinta demi harta antara lain berwujud praktik pelacuran, pelacuran terselubung, wanita/pria simpanan dan panggilan, serta “cewek tender” dan sejenisnya. Seseorang pria yang mempunyai wanita simpanan, mengkorupsi cinta isterinya, dan ia giat mencari harta untuk mencukupi mereka. Korupsi 3Ta dapat dilakukan dengan suap (atau iming-iming) harta, tahta, dan cinta untuk memperoleh 3Ta yang lebih banyak/besar lagi.

Dalam perspektif agama, korupsi 3Ta merupakan indikasi lemahnya Takwa, atau bisa juga disebut Korupsi Takwa. Dalam perspektif kebudayaan, korupsi 3Ta melunturkan keadaban masyarakatnya. Dan dalam perspektif komunikasi, korupsi 3Ta menjadikan komunikasi bermuatan kebohongan sehingga komunikasi dan komunikatornya tidak komunikatif, sekalipun amat fasih dan memikat.

Penelusuran mendalam dengan MAAMS yang mengidentifikasi korupsi 3Ta sebagai akar masalah sosial dan kemanusiaan menunjukkan adanya kesamaan dengan kajian mendalam dari Marx, Nietzsche, dan Freud, bahwa kebutuhan ekonomi, kehendak berkuasa, dan libido merupakan dorongan utama hidup manusia. Demikian pula kesamaan pernyataan Mircea Eliade bahwa manusia merupakan makhluk religius (*homo religiosus*) (Mangunhardjono, 1982) untuk konsep Takwa.

### 3. Solusi Dasar

Solusi dasar harus sesuai dengan akar masalahnya, yakni korupsi 3Ta atau motivasi memenuhi kebutuhan dasar harta, tahta, dan cinta asmara (hubungan pria-wanita). Terjadinya korupsi menunjukkan adanya “pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh-mewujud) tentang ‘yang benar’ dan ‘yang baik’, pada individu maupun sistem, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) 3Ta”.

#### a. Solusi dasar korupsi harta

Setiap orang dan lembaga harus dapat membuktikan atau dibuktikan asal usul hartanya secara sah, apabila tidak harta tersebut disita, dan yang bersangkutan dipidana sesuai dengan nilai harta tersebut.

#### b. Solusi dasar korupsi tahta

- Setiap calon pemimpin dan calon wakil rakyat ditelusuri riwayat hidupnya untuk diketahui kadar integritas kepribadiannya,

- Setiap kekuasaan harus dikendalikan dengan uji logika dan uji kejujuran.

#### c. Solusi dasar korupsi cinta

Pria dan wanita yang bukan mahram tidak boleh berada (terutama berduaan) di ruang terkunci, tertutup rapat, dan tempat yang sepi atau terpencil.

## 4. Penutup

Kelima contoh di atas mudah-mudahan cukup menjelaskan bagaimana MAAMS dapat diterapkan untuk menelusuri dan mengidentifikasi akar dari berbagai masalah sosial dan kemanusiaan. Penerapan MAAMS memiliki sejumlah manfaat sebagai berikut:

- (a) Menyediakan alternatif metode berpikir (mendalam) yang disertai dengan model atau peraga visual.
- (b) Memberi dasar epistemologis bagi penerapan *mixed methodology* ataupun *multimethods*.
- (c) Memfasilitasi pengkajian masalah dan solusi fundamental secara interdisipliner, multidisipliner, transdisipliner; berpikir *out of the box*.
- (d) Memperbaiki, mempercepat, meningkatkan, dan meluruskan proses berpikir, diskusi, perbincangan, dsb. yang bermaksud mencari solusi. Penerapan lebih lanjut bahkan diperkirakan dapat mengurangi kerumitan analisis masalah, meringkas masalah, dan mempersingkat masa pembelajaran.
- (e) (Bayangkan jika setiap 3-5 sel dalam tabel dikemas sebagai satu topik *talk show* atau diskusi atau bahkan penelitian, betapa banyak topik, waktu, tenaga, pikiran, dan biayanya. Dan inipun belum tentu sampai pada akar penyebab masalah maupun solusinya. Dengan MAAMS cukup 2-3 kali kesempatan saja, salah satunya khusus membahas solusi). Untuk situasi Indonesia pascakrisis 1997 yang menuntut pemulihan atau bahkan percepatan, penerapan MAAMS akan sangat membantu.
- (f) Menghindarkan kekeliruan identifikasi sebab/akar masalah (dari gejala masalah). Hal ini dapat diterapkan secara praktis untuk melengkapi *Collaborative Learning* dan *Problem-Based Learning* dalam Program Dasar Pendidikan Tinggi di UI. Tanpa MAAMS, mahasiswa yang menerapkan PBL, khususnya untuk masalah sosial kemanusiaan, hanya tahu masalah tetapi bukan akarnya, sehingga dikhawatirkan menjadi calon ahli masalah-masalah, itupun bukan masalah yang dasar, dan juga tanpa solusi yang fundamental.
- (g) Mengkategorikan masalah secara hirarkhis: permukaan, tengah, dan dasar. Hal ini secara praktis dapat digunakan untuk menyusun agenda dan program penelitian dari visi *research university*, dan menyeleksi daftar usulan penelitian.
- (h) Mempermudah pengkategorian penyelesaian masalah secara strategis dan kronologis

(menghasilkan jenjang solusi suatu masalah): jangka pendek, menengah, panjang.

- (i) Membedakan mana kegiatan yang seharusnya sementara saja dan mana yang harus berkelanjutan (mencegah *vested interest* “aktivitas sosial” tertentu yang lebih menguntungkan pelakunya (popularitas dan finansial).
- (j) Mengajak penggunaanya berpikir dengan menyertakan nilai-nilai dan norma kebenaran dan kebaikan, mengarahkan pemikiran pada kebenaran dan kebaikan perilaku, bukan hanya sukses pencapaian teknis.

Sebagai catatan terakhir perlu dikemukakan bahwa MAAMS ini merupakan suatu bagian saja dari cara berpikir tertentu yang ada pada penulis yang boleh jadi mengandung kesatuan ontologi, epistemologi, aksiologi, dan paradigma tertentu pula.

### Daftar Acuan

Bagus, L. (1991). *Metafisika*. Jakarta: Gramedia.

Bakker, A. (1986). *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Budi Hardiman, F. (1990). *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Yogyakarta: Kanisius.

Chang, R.Y. & Keith K.P. (2003). *Langkah-langkah pemecahan masalah*, terj. Abdul Rasyid. Jakarta: Penerbit PPM.

Cooke, S. & Slack, N. (1991). *Making management decisions*, 2nd ed. Englewood Cliffs. NJ.: Prentice Hall Inc.

Gaspers, V. (2007). *team oriented problem solving, panduan kreatif solusi masalah untuk sukses*. Jakarta: Gramedia.

Harsono P., A. (2002). “Menjadi insan akademik seutuhnya”, makalah untuk bahan *Buku Panduan Mahasiswa Baru UI*.

Heryanto, A. (1999). “Ilmu sosial indonesia krisis berkepanjangan”, *Kompas*, 18 November, halaman: 4.

Herry-Priyono, B. (2002). *Anthony Giddens: Suatu pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Hayon, Y.P. (2005). *Logika, prinsip-prinsip bernalar tepat, lurus, dan teratur*. Jakarta: ISTN.

Kartasasmita, H. (1994). “Rubrik pajak”, *Kompas*.

Kwik Kian Gie. (2004). “KKN akar semua permasalahan bangsa”, *Kompas*, 4 Agustus, halaman: 4.

Magnis-Suseno, F. (1989). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Yogyakarta: Kanisius.

Mangunhardjono. (1982). “Homo religiosus menurut Mircea Eliade” dalam M. Sastrapratedja *Manusia multidimensional: Sebuah renungan filsafat*. Jakarta: Gramedia.

Muhadjir, N. (2001). *Filsafat ilmu: Positivisme, postpositivisme, dan postmodernisme*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Rapar, J.H..(1996). *Pengantar filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

Prent, K., Adisubrata, J., Purwadarminta, W.J.S. (1969). *Kamus latin*. Jakarta.